

---

---

**PENGARUH PENERAPAN SIPD TERHADAP KEMUDAHAN  
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD  
PEMERINTAH KOTA CIMAHI**

<sup>1)</sup>Rini Indah Susanti\*, <sup>2)</sup>Rezky Afiहतul Barokah, <sup>3)</sup>Warman Suryaman

<sup>1), 2), 3)</sup> Program Studi Administrasi Publik, STIA Bandung

<sup>1)</sup>[indahrini@gmail.com](mailto:indahrini@gmail.com), <sup>2)</sup>[rezkybarokah@gmail.com](mailto:rezkybarokah@gmail.com), <sup>3)</sup>[warmansurya@gmail.com](mailto:warmansurya@gmail.com)

\*[indahrini@gmail.com](mailto:indahrini@gmail.com)

---

---

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penerapan SIPD terhadap kemudahan penyusunan laporan keuangan SKPD Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data penelitian di kumpul dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner (angket) dalam bentuk skala likert. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dengan rumus regresi linear sederhana. Data dijelaskan dalam bentuk tabel dan narasi hasil olahan data dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh penerapan SIPD terhadap kemudahan penyusunan laporan keuangan SKPD Kota Cimahi yang sangat signifikan yaitu sebesar 0,885 atau 88,5% yang menunjukkan bahwa penerapan SIPD mempengaruhi kemudahan penyusunan laporan keuangan SKPD Kota Cimahi dan sisanya 11.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian diterima karena didukung oleh nilai signifikansi.

Kata kunci: Keuangan, Laporan, Pemerintah, Sistem Informasi

---

---

**Abstract**

The purpose of this study was to determine whether there was an effect of SIPD implementation on the ease of preparing SKPD financial reports in Cimahi City. This research uses quantitative methods. Research data was collected using data collection techniques using a questionnaire (questionnaire) in the form of a Likert scale. The data were analyzed using descriptive statistics with a simple linear regression formula. The data is explained in the form of tables and narratives as a result of data processing with the help of SPSS. The results showed that there was an effect of the application of SIPD on the ease of preparing SKPD financial reports in Cimahi City which was very significant, namely 0.885 or 88.5% which indicated that the

application of SIPD affected the ease of preparing SKPD financial reports in Cimahi City and the remaining 11.5% was influenced by other variables that were not examined in this study. Therefore, the hypothesis in this study is accepted because it is supported by the significance value.

Keywords: Finance, Government, Information Systems, Reports

## PENDAHULUAN

Instansi pemerintah, seperti halnya penyelenggara layanan publik, mengadopsi electronic government untuk mendukung pemenuhan tuntutan tersebut dan upaya mengantisipasi perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya penggunaan teknologi informasi (electronic government). Electronic Government adalah upaya penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Padahal sebelumnya pemerintah telah menerapkan sistem dan proses kerja berdasarkan tatanan birokrasi yang kaku sehingga tidak memungkinkan untuk merespon perubahan yang kompleks dan dinamis, diperlukan sistem dan proses kerja yang lebih fleksibel untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan bagian lain. Ini adalah struktur hierarki yang kompleks. Sistem manajemen modern dengan jaringan organisasi yang dapat memperpendek garis pengambilan keputusan perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam di masa depan. Dalam pengambilan keputusan, sistem informasi birokrasi dan sistem informasi manajemen akan terbuka dan transparan, dengan akses ke beberapa lapisan sehingga informasi dapat disampaikan secara seragam (Basir, 2021:42).

Tujuan penting adanya penyajian informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu pemerintah daerah kepada para pemakai laporan keuangan. Dalam pengelolaan keuangan, memiliki hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Akuntansi pemerintahan juga memiliki peran sangat penting untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terkait dengan tugas tersebut, pemerintah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga

mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Oktavia & Aliyah, 2022).

Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan daerah secara akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel (Setyowati et al, 2016:182). Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Cimahi merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)nya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran) dan barang/aset yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kepala SKPD disebut sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pengguna Barang (PB). SKPD selaku entitas akuntansi pada dasarnya menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (yang mencakup anggaran dan barang, diiringi dengan dana yang dikelola oleh bendahara selaku pejabat fungsional).

Dengan diberlakukannya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) maka RKA sebagai dokumen yang digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang antar lain memuat rencana Program dan Kegiatan, serta Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan SKPD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam SIPD sebagai suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah. Pada fenomena yang terjadi di seluruh SKPD Pemkot Cimahi terkait pengimplementasian SIPD, masih banyak kendala yang dialami oleh pengguna aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kerjasama Serta partisipasi setiap instansi serta pegawai yang terlibat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan ini. Terlepas dari tujuan dan bagaimana penggunaan sistem informasi pemerintahan daerah dengan berbagai keterbatasan tidak sedikit pegawai yang masih kesulitan dalam pembuatan laporan. Dalam era digital yang semakin maju, penerapan sistem informasi pemerintahan daerah menjadi suatu kebutuhan penting. Saat ini banyak daerah yang menyusun laporan keuangannya dalam format top down sehingga kurang bisa menghasilkan laporan keuangan yang kredibel karena tidak adanya konsolidasi yang ditandai dengan SKPD tidak menyerahkan laporan keuangan atau terlambat menyerahkan atau bahkan belum bisa menyusun laporan keuangan sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang tertuang dalam PP 71 Tahun 2010. Maka dari itu penyusunan secara bottom up memiliki peranan penting untuk menghasilkan laporan yang kredibel dan akuntabel sehingga terwujudnya good governance dalam rangka menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah.

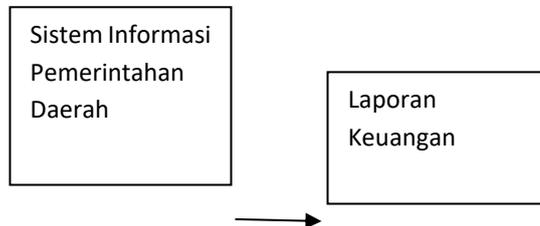
Dalam konteks pemerintahan daerah, SIPD memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan. Laporan keuangan yang akurat dan transparan sangat diperlukan untuk memastikan pertanggungjawaban keuangan yang baik dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi pemerintahan daerah SKPD Pemkot Cimahi diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam proses dan penyajian laporan keuangan. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang manfaat dan kegunaan sistem informasi pemerintahan daerah oleh SKPD dapat menjadi hambatan dalam penggunaannya secara optimal di SKPD Pemkot Cimahi. Mungkin juga terdapat kecenderungan resistensi terhadap perubahan dari beberapa pihak yang terlibat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian tentang Pengaruh Penerapan SIPD Terhadap Kemudahan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Kota Cimahi.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah. SIPD adalah jaringan yang mengumpulkan data secara terpadu di daerah dan pusat dengan menggunakan teknologi informasi, yang menyajikan basis data dalam bentuk delapan kelompok data meliputi: Data Umum, Sosial Budaya, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, Ekonomi, Keuangan Daerah, Politik, Hukum dan Insidental (Arief & Hayati, 2021).

Menurut Junaedi (2018:9) Laporan keuangan adalah: hasil akhir dari proses pencatatan dan perhitungan yang berisi ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan selama periode tertentu. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Pencatatan aktivitas yang memiliki usaha berskala mikro kecil dan menengah maupun besar harus mempunyai catatan keuangan karena ini sangat penting terhadap masa depan usahanya.

## **Kerangka Berpikir**

Berikut merupakan kerangka pemikiran yang diambil berdasarkan hasil uraian teoritis:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

### Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang ditetapkan dalam penelitian atau dengan kata lain merupakan jawaban teoritis namun belum menjawab secara empirik. Adapun hipotesis yang diterapkan oleh peneliti adalah “Terdapat Pengaruh Penerapan SIPD Terhadap Kemudahan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Kota Cimahi”.

Dikarenakan penelitian ini akan menggunakan analisis data statistik dari sampel yang diambil, maka hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut:

Hipotesis dalam penelitian ini merupakan dugaan adanya Terdapat Pengaruh Penerapan SIPD Terhadap Kemudahan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Kota Cimahi.

Penelitian terkait yang pertama dilakukan oleh Mahruzia pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan BPPKAD Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan data primer melalui kuesioner. Subjek penelitian ini yaitu pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi

atau tata usaha keuangan yang telah bekerja selama 2 tahun dengan pendidikan terakhir minimal D3 semua jurusan. Sampel pada penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling dengan total 55 sampel yang memenuhi kriteria. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software IBM SPSS Statistics 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPPKAD Kabupaten Sumenep. (2) pemanfaatan teknologi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPPKAD Kabupaten Sumenep. (3) pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPPKAD Kabupaten Sumenep.

Penelitian terkait berikutnya dilakukan oleh Basri pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Tujuan dari penelitian ini adalah apakah penggunaan sistem informasi berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang spesifikasinya sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas dari awal hingga realisasi proyek penelitian. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis korelasi, diperoleh nilai korelasi sebesar 0,790 sehingga nilai korelasi memiliki hubungan yang kuat. Hasil perhitungan uji korelasi memiliki nilai signifikansi 0,00 yang secara signifikan lebih kecil dari nilai yang ditentukan sebesar 0,05. dengan hasil tersebut maka keputusan yang diambil adalah menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$  yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan sistem informasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari hasil perhitungan, besarnya pengaruh penggunaan sistem informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bauba adalah 62,4%

Berdasarkan kedua penelitian terkait diatas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang tengah dilakukan. Persamaan dari penelitian terkait dengan penelitian ini terdapat pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan perbedaan pada penelitian terkait dengan penelitian saat ini ada pada lokus penelitian serta objek juga subjek dari penelitian.

## **METODE**

Penelitian ini tergolong ke dalam metode kuantitatif dengan objek penelitian ini adalah SIPD dan subjek adalah pengguna SIPD pada seluruh SKPD di Pemkot Cimahi. Skala pengukuran dalam penelitian ini adalah menggunakan skala ordinal dengan metode likert 5 skala. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data

yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel kualitas sistem informasi pemerintahan daerah yang terdiri dari Efficiency, Reliability, Fulfillment, Privacy, pada SKPD pengguna SIPD di Pemkot Cimahi. Berdasarkan tabel di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah merupakan Pengguna SIPD pada seluruh SKPD di Pemkot Cimahi yang berjumlah 40 orang. Dikarenakan populasi hanya 40 orang yang merupakan keseluruhan pegawai SKPD pengguna SIPD di Pemkot Cimahi, maka penelitian ini akan mengambil keseluruhan anggota populasi untuk menjadi sampel atau yang kemudian disebut sebagai responden yaitu sebanyak 40 orang. Hal tersebut merujuk pada pendapat Arikunto (2006) dalam Susanti & Sumaryoto, S. (2022:3), yang menyatakan bahwa ‘.. Apabila subjeknya kurang dari 100 orang lebih baik di ambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi Maka berdasarkan pernyataan tersebut, yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 orang atau sama dengan jumlah populasi. Hal ini seiring yang dinyatakan oleh Aditiya et al. (2022), yang menyatakan bahwa “sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel”. Maka jelas bahwa dalam penelitian ini sampel adalah sebanyak 40 orang pegawai SKPD pengguna SIPD di Pemkot Cimahi.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Salah satu faktor penting dalam sebuah penelitian adalah karakteristik dari responden yang mempunyai berbagai karakteristik yang dapat berpengaruh pada penerapan SIPD maupun penyusunan laporan keuangan oleh setiap pegawai yang menggunakan SIPD. Karakteristik ini meliputi karakteristik berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin dan usia.

### **Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan**

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam penggunaan SIPD. Karakteristik responden berdasarkan tingkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	SMP	1	2,5
2	SMA	7	17,5
3	D3	7	17,5
4	S1	17	42,5
5	S2	8	20
Total		40	100

(Sumber: Data SKPD Pemkot Cimahi, 2023)

### Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin di bawah ini menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 28 orang. Sedangkan responden dengan jenis kelamin perempuan adalah sebanyak 12 orang. Selengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	28	70
2	Perempuan	12	30
Total		40	100

(Sumber: Data SKPD Pemkot Cimahi, 2023)

### Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan hasil kuesioner, diperoleh data responden berdasarkan usia seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	18-29	2	5
2	30-39	14	35
3	40-50	22	55
4	>50	2	5
Total		40	100

(Sumber: Data SKPD Pemkot Cimahi, 2023)

### Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Dari hasil perhitungan dalam model summary dibawah ini, dapat dilihat nilai angka R adjusted square berikut:

Tabel 2. Model Summary

Model Summary b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.885a	.783	.778	6.435

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

sumber: data primer diolah

Besarnya angka adjusted R square ( $r^2$ ) adalah 0,885. Angka tersebut digunakan untuk melihat besarnya pengaruh penerapan SIPD secara gabungan terhadap kemudahan penyusunan laporan keuangan, dengan cara menghitung koefisien (KD) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{KD} &= r^2 \times 100 \% \\ &= 0,885 \times 100 \% \\ &= 88,5 \% \end{aligned}$$

Angka tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh penerapan SIPD dan kemudahan penyusunan laporan keuangan secara gabungan adalah sebesar 88,5 %, sedangkan sisanya sebesar 11,5% dipengaruhi faktor lain. Dengan kata lain, variabilitas kemudahan penyusunan laporan keuangan yang dapat diterangkan dengan menggunakan variabel penerapan SIPD dan kemudahan penyusunan laporan keuangan adalah sebesar 88,5%, sedangkan pengaruh sebesar 11,5% disebabkan oleh variabel-variabel lain diluar model ini. Sedangkan pengujian hipotesisnya, dapat dilakukan dengan cara membandingkan angka taraf signifikansi (sig) hasil penghitungan dengan taraf signifikansi 0,05 (5%) seperti terlihat pada tabel berikut menunjukkan besarnya nilai taraf signifikansi (sig) penelitian:

Tabel 3. Anova

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5686.330	1	5686.330	137.319	.000a
	Residual	1573.570	38	41.410		
	Total	7259.900	39			

a. Predictors:  
(Constant), X

b. Dependent  
Variable: Y

sumber: data primer diolah

Berdasarkan perhitungan dengan SPSS sebagaimana terlihat pada tabel anova diatas, bahwa angka signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh langsung antara penrapan SIPD dan kemudahan penyusunan laporan keuangan.

## **Pembahasan**

### **Penerapan SIPD dan Kemudahan Penyusunan Laporan Keuangan Oleh SKPD Pemkot Cimahi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan SIPD memperoleh nilai sig. = 0.000 (Nilai Sig. < 0,05) lebih kecil dari 0,05, yang artinya variabel penerapan SIPD berpengaruh signifikan terhadap kemudahan penyusunan laporan keuangan oleh seluruh SKPD Pemkot Cimahi, maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis yang menyatakan bahwa adanya Pengaruh Penerapan SIPD terhadap kemudahan penyusunan laporan keuangan oleh seluruh SKPD di Pemkot Cimahi. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel penerapan SIPD terhadap kemudahan penyusunan laporan keuangan oleh seluruh SKPD di Pemkot Cimahi. Dengan diaplikasikannya SIPD secara baik dan benar pada akhirnya dapat meningkatkan kemudahan penyusunan laporan keuangan oleh seluruh SKPD di lingkungan instansi tersebut, dan hal ini hendaklah dapat dijaga dengan baik oleh pegawai dan pimpinan sehingga terjadi kesinambungan yang harmonis dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan instansi seperti yang diinginkan oleh instansi itu sendiri, yang pada akhirnya akan membawa dampak yang positif yang berada dalam instansi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat kita ketahui bersama bahwa pada umumnya seluruh SKPD Pemkot Cimahi sudah dapat menerapkan SIPD dengan baik sehingga dapat menyusun laporan keuangan menggunakan SIPD.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel penerapan SIPD dan kemudahan penyusunan laporan keuangan oleh SKPD Pemkot Cimahi sebesar 88,5%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan penerapan SIPD di instansi tersebut akan meningkatkan kemudahan penyusunan laporan keuangan. Adapun berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka disarankan agar pimpinan seluruh SKPD di Pemkot Cimahi berupaya meningkatkan atau mempertahankan penerapan SIPD yang ada, melalui keterlibatan, konsistensi, adaptabilitas dan misi,

maka akan berdampak pada peningkatan kualitas kemudahan penyusunan laporan keuangan oleh seluruh SKPD di Pemkot Cimahi. Selain itu agar kiranya fasilitas penunjang pegawai dapat dilengkapi lagi supaya pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dapat dimaksimalkan dengan baik. Kemudian pegawai di seluruh SKPD Pemkot Cimahi agar kiranya dapat berkoordinasi serta bersinergis dalam melaksanakan pekerjaannya supaya pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pegawai dapat terorganisir dengan baik.

## REFERENSI

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arief, A. F., & Hayati, R. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dilihat dari Aspek Struktur Birokrasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong. *Japb*, 4(2), 732-749.
- Basir, M. A. (2021). Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jek: Jurnal Efek Komunikasi*, 2(2), 41-48.
- Eliza, A., & Ramdani, R. F. (2020). Perbandingan Historical Cost dan Current Cost Sebagai Dasar Penilaian Zakat Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 8(1, April), 55-70.
- Indika, N., & Adia, S. (2021). Pengaruh Kompensasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Turnover Intention Karyawan Pada Pt Elang Transportasi Indonesia Di Jakarta. *Jambis: Jurnal Administrasi Bisnis*, 1(2), 64-73.
- Junaedi, A. (2018). Penelitian Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Berdasarkan SAK EMKM Untuk Bidang Usaha Perdagangan. Tangerang: Mahara Publishing.
- Mahruzia, H. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep) (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim).
- Pemerintah Pusat. (2003). Undang-Undang No. 17 tentang Keuangan Negara. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>. (11 November 2022).

- Pemerintah Pusat. (2003). Undang-Undang No.32 tentang Pemerintahan Daerah. Tersedia di; <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>. (11 November 2022).
- Pemerintah Pusat. (2010).Peraturan Pemerintah No. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010> (11 November 2022).
- Pemerintah Pusat. (2005). Peraturan Pemerintah tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49722/pp-no-56-tahun-2005>. (22 November 2022).
- Oktavia, W. T., & Aliyah, S. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah. *Among Makarti*, 15(2).
- Purwati, A. S. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada UMKM di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Banyumas*. Artikel [jp. feb. unsoed. ac. Id](http://www.unsoed.ac.id).
- Riduwan, & Kuncoro. E. A. (2011). Cara Menggunakan dan Memaknai Path Analysis (Analisis Jalur). Edisi Revisi, Bandung: Alfabeta.
- Sari, T. P. (2021). Pengaruh Kualitas Penyajian, Harga dan Kebersihan Terhadap Keputusan Konsumen dalam Membeli Makanan Pada CV. Epen Catering. *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 275-285.
- Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Kinerja*, 20(2), 179-191.
- Sugiono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Usman, U., & Pakarti, P. (2016). Scorecard Pengukuran Kinerja Fungsional Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
- Unaradjan, Dominikus Dolet. (2019). *Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu komunikasi. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83-90.